

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Partai Politik

Eksistensi partai politik sebagai suatu kekuatan politik telah lahir sejak awal abad ke 19 di Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik, maka lahirlah partai politik yang akan menghubungkan rakyat dan pemerintah.

Partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama dan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

1. Pengertian Partai Politik

Menurut Carl J. Friedrich dalam Miriam Budiardjo (2001: 161), partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberi kepada anggota partainya manfaat secara ideal maupun materil (*A political party is a Group of human beings. Stably organized white the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the futher objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).

Pengertian di atas menekankan partai politik sebagai sebuah organisasi yang stabil dan terdiri dari sekelompok manusia sebagai anggotanya, organisasi ini bertujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan dan pemerintahan atas nama partainya dan berdasarkan kekuasaan yang dimiliki ini, partai akan memberikan *reward* kepada anggota partainya, baik berbentuk materil maupun non materil.

Menurut RH. Soltau dalam Miriam Budiardjo (2001:161), Partai politik adalah warga negara terorganisir dan bertindak sebagai satu kesatuan politik, serta dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum (*A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies*).

Pengertian di atas menekankan partai politik sebagai kesatuan politik dari sekelompok warga negara, baik dengan jumlah sedikit maupun banyak, kesatuan politik ini bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam kesatuan politik mereka.

Menurut Sigmund Neumann dalam Eman Hermawan dkk (2004: 35), Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut, mendukung rakyat atas dasar persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang berbeda” (*A political party is the articulate organization of society’s active political agents, those who concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views*).’

Pengertian di atas menekankan partai politik sebagai organisasi yang beranggotakan aktivis-aktivis politik yang bertujuan menguasai kekuasaan pemerintahan dan merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui ciri-ciri yang umumnya dapat ditemukan pada setiap partai politik yaitu sebagai organisasi yang memiliki anggota para aktivis politik, memiliki tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, mempengaruhi dan mencari dukungan rakyat sebanyak-banyaknya untuk mempertahankan eksistensi partai di tengah-tengah persaingan partai politik dalam sistem demokrasi, dan merupakan cermin kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat.

2. Ciri-Ciri Partai Politik

Dalam konteks Negara modern atau kontemporer, orang sangat sulit berbicara politik tanpa membicarakan partai. Artinya dimana ada pembicaraan mengenai politik yang meliputi proses-proses politik, maka didalamnya terdapat partai politik. Kehadiran partai politik didalam suatu negara tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsinya, tidak hanya kepada konstituen yang dikelola tetapi juga kepada bangsa dan Negara. Karena partai politik dapat menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan publik yang nantinya akan menentukan kebijakan-kebijakan publik yang berdampak luas, tidak hanya kepada konstituennya saja tetapi juga kepada bangsa dan negara, maka kehadiran partai politik perlu diletakkan pada kerangka yang lebih luas tidak terbatas pada kelompok ideologis mereka saja.

La Palombara dan Wainer (Firmanzah, 2008: 67-68) mengemukakan bahwa ada empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik.

Keempat karakteristik dasar tersebut adalah:

- a) Organisasi jangka panjang. Organisasi partai politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Partai politik bukan sekedar gabungan dari para pendukung yang setia dengan pemimpin yang kharismatik. Partai politik hanya akan berfungsi dengan baik sebagai organisasi ketika ada sistem dan prosedur yang mengatur aktivitas organisasi, dan ada mekanisme suksesi untuk jangka waktu yang lama.
- b) Struktur organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai dengan tingkat nasional, dan ada pola interaksi yang teratur diantara keduanya. Partai politik kemudian dilihat sebagai organisasi yang meliputi satu wilayah teritorial serta dikelola secara prosedural dan sistematis. Struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran informasi dari bawah keatas maupun dari atas kebawah, sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.
- c) Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik dilevel lokal maupun nasional.
- d) Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Dukungan inilah yang menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa partai politik harus mampu

diterima oleh mayoritas masyarakat dan sanggup memobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai politik, semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya.

Menurut Ramlan Subakti (1992: 114-115), yang mengemukakan bahwa ciri-ciri partai politik adalah sebagai berikut:

- a) Partai politik berakar dalam masyarakat lokal, dalam arti bahwa partai mempunyai cabang-cabang di setiap daerah
- b) Melakukan kegiatan secara terus-menerus, dengan penyusunan program kegiatan yang berkesinambungan
- c) Berusaha memperoleh dan memperhatikan kekuasaan dalam pemerintahan
- d) Ikut serta dalam pemilihan umum
- e) Mempunyai landasan ideologis
- f) Sebagai Pembina kesadaran nasional dan mengarahkan massa untuk mencapai kemerdekaan (dalam masyarakat yang tengah dijajah)

Berdasarkan gambaran ciri-ciri partai politik yang dikemukakan diatas, organisasi politik baru dapat dikatakan atau diklaim sebagai partai politik apabila merupakan kelompok orang yang terorganisasi dan berakar dalam masyarakat formal dengan memiliki beberapa tujuan dan beraktivitaskan menyeleksi kandidat pejabat publik secara berkesinambungan.

3. Tipologi Partai Politik

Menurut Haryanto (2005: 567-568) komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu partai massa dan partai kader.

- a. Partai Massa ialah memiliki ciri utama yaitu jumlah anggota atau pendukung yang banyak. Meskipun demikian, partai jenis ini memiliki program walaupun program tersebut agak kabur dan terlampau umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Selanjutnya jika kepentingan kelompok tersebut tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri.
- b. Partai Kader ialah suatu partai yang mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah, partai kader lebih mementingkan disiplin anggota dan ketaatan dalam berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya. Bagi anggota yang menyeleweng, akan dipecat keanggotaannya.

4. Fungsi Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2000: 163-164), dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi:

- a. Partai sebagai sarana komunikasi politik.

Salah satu fungsi dari partai politik adalah menyalurkan beraneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir. Apabila tidak ditampung dan digabung dengan aspirasi orang lain yang senada, proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*intrest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat

dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan "perumusan kepentingan" (*interest articulation*).

b. Partai sebagai sarana sosialisasi Politik

Partai politik juga memainkan peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui seseorang memperoleh Pengetahuan, sikap dan nilai serta orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Partai politik sebagai agen atau sarana sosialisasi politik dalam melaksanakan proses sosialisasi politiknya memperkenalkan nilai-nilai, pengetahuan maupun sikap-sikap politik yang diajarkan partai politik merupakan materi dari sosialisasi politik, antara lain terdiri dari ideologi partai, *platform* partai, program-program partai maupun kandidat-kandidat partai yang akan mewakili rakyat.

c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai Politik juga berfungsi sebagai untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah dengan melalui kontak pribadi persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader dimasa datang akan menggantikan pimpinan lama (*selection of leadership*).

d. Partai politik sebagai sarana pengaturan konflik (*conflict management*)

Dalam suasana demokratis, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar jika terjadi konflik partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam praktik politik sering dijumpai bahwa fungsi-fungsi diatas tidak didapati seperti yang diharapkan. Misalnya informasi yang diberikan justru memberikan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat; yang dikejar bukan kepentingan nasional akan tetapi kepentingan partai yang sempit dengan akibat pengkotakan partai; konflik tidak diselesaikan, akan tetapi lebih dipertajam.

5. Sistem Kepartaian

Ilmuwan politik Italia bernama Giovanni Sartori dalam Ramlan Subakti (1992: 127) berpendapat tentang sistem kepartaian. Menurutnya, penggolongan sistem kepartaian bukan masalah jumlah partai, melainkan jarak ideologi di antara partai-partai yang ada.

Kongkretnya, penggolongan sistem kepartaian didasarkan atas jumlah kutub (polar), jarak di antara kutub-kutub itu (polaritas), dan arah perilaku politiknya. Oleh karena itu, sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu pluralisme sederhana, pluralisme moderat, dan pluralisme ekstrim. Adapun penggolongan sistem kepartaian menurut sartori sebagai berikut:

Tabel 1
Sistem Kepartaian Menurut Sartori

Sistem kepartaian	Kutub	Polaritas	Arah
Pluralisme Sederhana	Bipolar	Tidak ada	Sentripetal
Pluralisme Moderat	Bipolar	Kecil	Sentripetal

Pluralisme Ekstrim	Multipolar	Besar	Sentrifugal
--------------------	------------	-------	-------------

Sumber: Surbakti (1992: 127)

Yang dimaksud dengan *bipolar* ialah kegiatan aktual suatu sistem partai yang bertumpu pada dua kutub, meskipun jumlah partai lebih dari dua karena sistem kepartaian ini tidak memiliki perbedaan ideologi yang tajam. Yang dimaksud dengan *multipolar* ialah sistem partai yang bertumpu pada lebih dari dua kutub yang biasanya terdiri atas lebih dari dua partai dan di antara kutub-kutub itu terdapat perbedaan ideologi yang tajam. Namun, yang terpenting tidak hanya jumlah kutub, tetapi juga jarak antara kutub-kutub tersebut. Yang dimaksud dengan polaritas yang besar ialah jarak ideologi di antara kutub-kutub yang sangat jauh: yang satu berideologi kiri (komunisme), yang lain berideologi kanan (kapitalisme).

Dengan kata lain, perbedaan ideologi di antara partai-partai sangat tajam. Polarisasi yang besar ini merupakan indikator yang menunjukkan ketiadaan konsensus dasar mengenai asas dan tujuan masyarakat-negara yang hendak dituju. Akan tetapi, hal ini tidak harus ditafsirkan sebagai perpecahan yang tak terintegrasikan karena hal itu mungkin merupakan gejala sementara yang masih dapat diatasi. Dalam hal ini, perlu diperhatikan arah perilaku politik setiap partai apakah menuju ke pusat atau keintegrasi nasional (*sentripetal*) ataukah menjauhi pusat atau hendak mengembangkan sistem tersendiri (*sentrifugal*).

B. Tinjauan Tentang Kaderisasi

1. Pengertian Kaderisasi

Menurut Abdussalam (2002: 3), secara terminologis, definisi kaderisasi adalah proses pencetakan kader, sedangkan definisi kader itu sendiri adalah orang yang dipercaya mampu melanjutkan dan melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, Kaderisasi adalah proses, cara, atau pembuatan dalam usaha mendidik manusia-manusia yang memiliki kompetensi yang mapan untuk menjalankan amanah dalam suatu organisasi.

Kaderisasi berfungsi untuk mempersiapkan orang-orang yang berkualitas, yang nantinya dipersiapkan untuk melanjutkan perjuangan sebuah organisasi. Tanpa kaderisasi, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah organisasi dapat bergerak dan melakukan tugas-tugas keorganisasiannya dengan baik dan dinamis. Hal ini sejalan dengan pola kaderisasi partai politik tentang fungsi kaderisasi yang menyatakan bahwa fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon (embrio) yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang umum.

Koirudin mendefinisikan kaderisasi sebagai proses penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kelak mereka menjadi pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi orang secara lebih bagus (2004: 113). Dalam pengkaderan terdapat dua persoalan penting, yaitu :

1. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan para pengurusnya memfasilitasi pengadaan pendidikan dan pelatihan secara intensif di bidang-bidang tertentu terhadap kader-kadernya. Ini semua harus dilakukan pada semua tingkatan kepengurusan partai.

2. Kemampuan untuk menyediakan stok kader atau SDM organisasi, terutama pada kaum muda. Kaum muda akan menjadi sasaran yang efektif untuk menjadi sasaran pengkaderan untuk dijadikan terdidik dan berkualitas.

Kaderisasi organisasi dalam hal ini organisasi partai politik merupakan urat nadi organisasi. Peran dari kader partai politik adalah sangat penting, karena kepemimpinan partai politik nantinya akan sangat ditentukan oleh kualitas kader-kader yang dimilikinya, yang mana akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa.

Menurut Amir Pandjaitan (2005: 32), kaderisasi dalam suatu organisasi mempunyai peranan yang sangat penting. Adapun peran kaderisasi dalam suatu organisasi sebagai berikut :

Tabel 2.
Peran Kaderisasi dalam Organisasi

No	Peran	Keterangan
1	Penurunan nilai-nilai organisasi yang baik	Proses transfer nilai adalah suatu proses untuk memindahkan sesuatu (nilai) dari satu orang ke orang lain. Nilai-nilai ini bisa berupa hal-hal yang tertulis atau yang sudah tercantum dalam aturan-aturan organisasi (seperti Konsepsi, AD/ART, dan aturan-aturan lainnya) maupun nilai/budaya yang tidak terdapat dalam organisasi maupun kondisi-kondisi terbaru yang menjadi kebutuhan dan keharusan untuk ditransfer
2	Penjamin keberlangsungan organisasi	Organisasi yang baik adalah organisasi yang mengalir, yang berarti dalam berjalannya waktu ada generasi yang pergi dan ada generasi yang datang (adanya proses regenerasi). Regenerasi berarti proses pergantian dari generasi lama ke generasi baru

3	Sarana belajar bagi anggota	Tempat dimana anggota mendapat pendidikan yang tidak didapat dibangku pendidikan formal. Pendidikan dalam konsep kaderisasi dibagi menjadi dua, yaitu pengajaran/ pembentukan (yang dalam lingkup kaderisasi lebih mengacu pada karakter) dan pelatihan/pengembangan (yang dalam lingkup kaderisasi lebih mengacu pada skill)
---	-----------------------------	---

Sumber: Amir Pandjaitan (2005: 32)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah organisasi, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke depan. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan.

2. Kaderisasi Partai Politik

Kaderisasi merupakan salah satu hal yang paling penting dalam sebuah organisasi termasuk partai politik, mengingat kaderisasi adalah bagian yang sangat menentukan umur sebuah partai politik. Sebuah partai politik hanya akan mampu bertahan dari berbagai tantangan dan perubahan zaman jika dapat melakukan regenerasi dengan baik. Dalam rangka melakukan regenerasi yang baik, maka mutlak diperlukan suatu proses kaderisasi yang teratur dan berjenjang.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rochajat Harun (2006: 94) yang menyatakan bahwa Kaderisasi yang baik setidaknya memiliki beberapa jenjang yang diperuntukkan bagi para kadernya. Klasifikasi jenjang kaderisasi menurut Rochajat Harun adalah jenjang pertama yang diperuntukkan bagi kader pemula, jenjang kedua yang diperuntukkan bagi kader madya dan

jenjang ketiga yang diperuntukkan bagi calon-calon politisi. Kaderisasi merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik, biasanya dilakukan dengan menanamkan sejumlah informasi politik yang dilakukan dengan sengaja kepada orang-orang tertentu, dalam hal ini adalah kader partai. Informasi politik yang diberikan biasa berupa pengetahuan (*knowledge*) politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Dalam pola kaderisasi juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan keahlian berpolitik.

Proses kaderisasi yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik merupakan suatu pembinaan terhadap seseorang yang bertujuan agar seseorang itu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. urgensi pendidikan politik menurut Idrus Affandi (2009: 28), adalah Pendidikan dengan indoktrinasi dipandang sudah kurang tepat, karena dalam banyak hal terbukti kurang memberi hasil sebagaimana diinginkan. Sementara itu penyadaran politik lebih berorientasi pada tindakan, yakni mempraktekan apa yang telah diketahui dan dipahami masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan politik yang efektif tidak sekedar menambah pengetahuan, tetapi sampai pada tingkat pengambilan keputusan dalam tindakan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dengan pendidikan politik selain akan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan seseorang mengenai politik juga akan meningkatkan keterampilan seseorang dalam bertindak secara politik.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dalam rangka memberi pelatihan serta bimbingan untuk

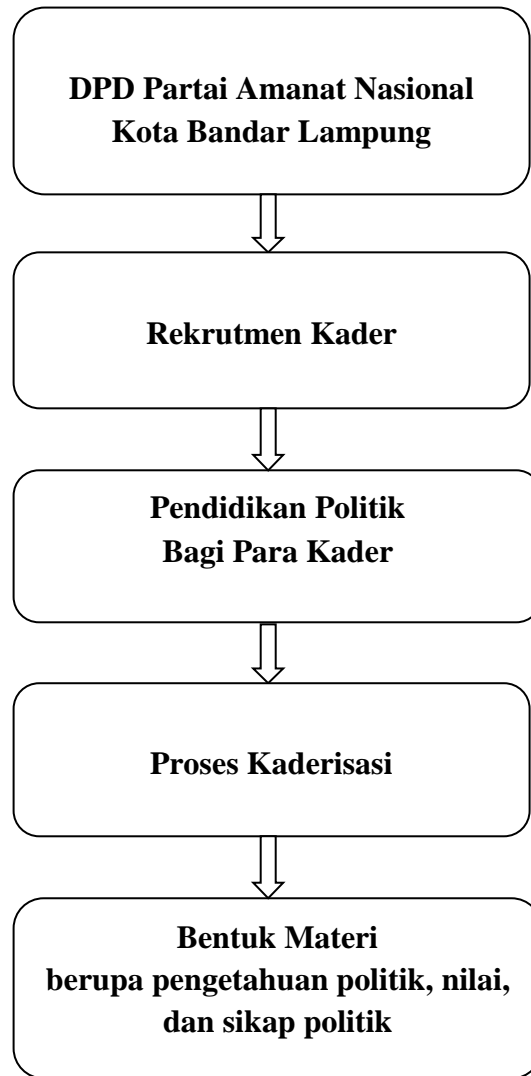
mengembangkan potensi diri yang dimiliki seseorang, yang meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Stradling (Yani Suryani, 2009: 23) bahwa substansi pendidikan politik meliputi *Pertama*, pengetahuan yang terdiri dari pengalaman profesional dan pengetahuan praktikal. *Kedua*, keterampilan yang terdiri dari keterampilan intelktual, keterampilan tindakan, keterampilan komunikasi. *Ketiga*, sikap dan nilai-nilai prosedural, kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik yang tercermin dalam pendidikan politiknya merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan dengan sengaja oleh partai politik dalam rangka melakukan regenerasi dengan baik.

C. Kerangka Pikir

Kaderisasi pada partai politik merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik bagi para kadernya. Kaderisasi yang dijalankan oleh partai politik biasanya dilakukan dengan menanamkan sejumlah informasi politik yang dilakukan dengan sengaja kepada orang-orang tertentu, dalam hal ini kader partai. Informasi politik yang diberikan biasa berupa pengetahuan politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan Negara. Dalam kaderisasi juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan keahlian berpolitik.

Kaderisasi dikatakan berhasil apabila dari proses kaderisasi tersebut mampu menciptakan pribadi yang tangguh dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai, sehingga antara dirinya dan partai merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mampu menjadi solusi dari masalah-masalah yang muncul bagi partai kemudian hari. Keberhasilan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik yang bisa menghasilkan kader-kader muda yang handal akan dengan sendirinya menghapuskan kekecewaan publik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses Kaderisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kota Bandar Lampung, sebagaimana dapat dilihat pada bagan kerangka pikir di bawah ini :



Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir Penelitian

